

**UJIAN SKRIPSI**

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
SIDOARJO



# Strategi Pengembangan e-Government Melalui e-Buddy dalam Mendukung Administrasi di Kabupaten Sidoarjo

Oleh : Maryono

Nama Dosen Pembimbing : Ilmi Usrotin Choiriyah, M.AP

Progam Studi Administrasi Publik  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
2025



[www.umsida.ac.id](http://www.umsida.ac.id)



[umsida1912](#)



[umsida1912](#)



[universitas  
muhammadiyah  
sidoarjo](#)



[umsida1912](#)

# Latar Belakang

- **Era Globalisasi** telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik Ilmu pengetahuan dan teknologi, birokrasi, budaya, kesehatan, sosial , ekonomi termasuk **administrasi pemerintahan**.
- Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan **e-Government** menjadi landasan hukum bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (**SPBE**) di Indonesia
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang **Tata Naskah Dinas Elektronik (TND)** yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Sidoarjo melalui **Tranformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan (E-Buddy)**

# Gap Permasalahan

- Implementasi e-Buddy sebagai sistem pendukung dalam pengelolaan administrasi di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Salah satu permasalahan utama adalah **kurang optimalnya pemahaman** pengguna terhadap fitur naskah dinas dalam aplikasi ini. **Banyak pegawai** yang hanya memanfaatkan e-buddy sebagai alat presensi saja. Padahal, **tujuan e-Buddy** untuk membantu pengelolaan naskah dinas secara elektronik, sehingga respon surat masuk, surat keluar dan disposisi dari internal maupun eksternal dapat **dilakukan kapanpun dan dimanapun**.
- Permasalahan lain yang sering terjadi adalah terkait dengan infrastruktur dan stabilitas sistem e-Buddy itu sendiri. Masalah seperti **server yang sering mengalami gangguan, akses yang lambat, dan integrasi data yang kurang optimal** antara unit kerja menjadi hambatan dalam mendukung pelayanan yang cepat dan akurat. Beberapa wilayah di Kabupaten Sidoarjo berada pada zona *blank spot* (tidak ada sinyal).

# Data Empiris

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Pengelolaan Naskah Dinas Perangkat Daerah Tahun 2021-2024**

Clauster Unit kerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Approve Surat	Disposisi Surat	Approve Surat	Disposisi Surat	Approve Surat	Disposisi Surat	Approve Surat	Disposisi Surat
9 Perangkat Daerah Penunjang	47.276	304.901	23.376	263.764	47.288	304.920	44.007	301.870
22 Perangkat Daerah Teknis	76.086	373.395	41.908	249.322	79.703	381.352	70.368	365.181
18 Kecamatan	28.291	135.017	23.157	96.789	28.586	124.383	28.572	129.102

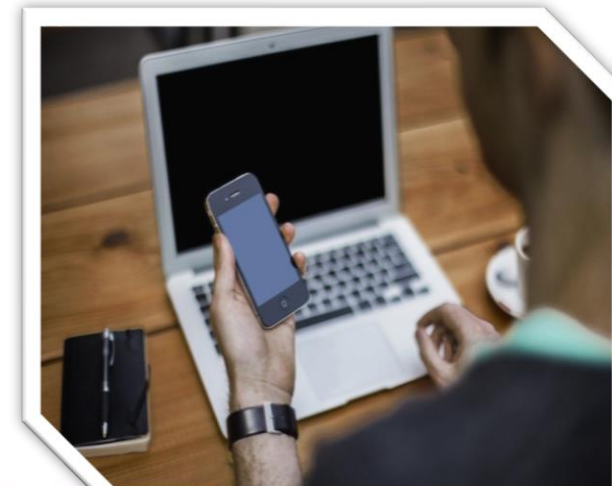
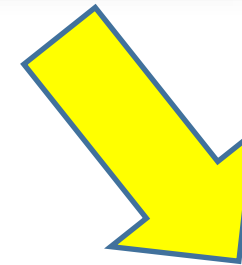
Sumber : Diolah penulis

## Keterangan :

- 9 Perangkat Daerah Penunjang : Setda, Setwan, Inspektorat, BPKAD, BPPD, BKD, Bappeda, BPBD, Bangkespol
- 22 Perangkat Daerah Teknis : Dinkes, Dikbud, Disporpar, Dinkop, DPMPTSP, Dispendukcapil, Diskominfo, DLHK, DPUBMSDA, Dinsos, Disnaker, Disperindag, Dispangtan, Dinas PMD, Dinas Perkim, Dishub, Dinas Perikanan, Dinas Perpus, Dinas P3AKB, Satpol PP, Rumah Sakit Daerah Noto Puro, Rumah Sakit Daerah Barat
- 18 Kecamatan : Sidoarjo, Buduran, Waru, Sedati, Sukodono, Taman, Gedangan, Candi, Tanggulangin, Porong, Jabon, Tulangan, Krembung, Prambon, Wonoayu, Krian, Tarik, Balongbendo,

# Rumusan Masalah

- . E-Buddy diciptakan karena beberapa masalah, diantaranya :
  - Pemrosesan naskah dinas yang relatif lama karena masih menggunakan paraf dan tanda tangan basah dan juga sulit melakukan monitoring atau tracking surat, selain itu tumpukan berkas yang menggunung, dan juga lamanya proses pengiriman surat.
  - Optimalisasi peran dan tugas Sekretariat Daerah dalam tata Kelola pengembangan dan keberlanjutan e-buddy bagi seluruh aparatur unit kerja (perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, UPTD, puskesmas, desa, sekolah dasar negeri, dan sekolah menengah pertama negeri).
  - Penguatan pemahaman dan keterampilan aparatur dalam mengoperasikan e-Buddy khususnya fitur surat dinas pada saat berada di lingkungan kerjanya.





# Penelitian Terdahulu

1. Widdy Yuspita Widiyaningrum (2020) berjudul “Strategi Pengembangan *E-Government* Dalam Pelayanan Administrasi Secara Daring” Rangkuti (1997) dan Hasibuan (2002) menggaris bawahi pentingnya adaptasi teknologi dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas yang lebih baik, khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan berbasis daring
2. Nafisa Aulia Rani, Rumzi Samin dan Okparizan (2023) “Strategi Pengembangan *E-Government* Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang”. mengungkapkan bahwa pengembangan *e-government* merupakan bagian integral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan
3. Mohammad Bintang dan Muhammad Fadil (2022) “Analisis Pengembangan *E-Office* dalam Pelaksanaan *E-Government* Pada Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Kota Bekasi “. pengembangan *e-office* berjalan dengan baik. Namun, program ini memerlukan sosialisasi lebih lanjut, peningkatan infrastruktur, dan penanganan masalah teknis. Meskipun ada beberapa pencapaian, masih banyak yang perlu ditingkatkan, sehingga dalam penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam layanan publik untuk memenuhi harapan masyarakat.

**Persamaan** antara ketiga penelitian terdahulu dimaksud, memberikan gambaran tentang pentingnya pengembangan **e-government** sebagai strategi untuk meningkatkan **efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik** melalui pemanfaatan teknologi informasi. Semua penelitian juga menekankan pentingnya adaptasi teknologi, peningkatan kapasitas SDM, dan optimalisasi infrastruktur dalam mendukung implementasi **e-government**

**Perbedaan** pendekatan metodologis masing – masing penelitian Widdy Yuspita Widiyaningrum lebih menekankan kajian teoritis dengan pendekatan SWOT untuk **memahami tantangan dan peluang e-government** secara umum. Nafisa Aulia Rani fokus pada implementasi di Kota Tanjungpinang, dengan penekanan pada hambatan pasca-COVID-19 seperti **keterbatasan jaringan dan dana**. Mohammad Bintang dan Muhammad Fadil secara spesifik mengkaji pengembangan *e-office* di Kota Bekasi dengan pendekatan studi kasus kualitatif untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan **hambatan teknis dalam pelaksanaan e-government**.

# Metode Penelitian

- **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif

- **Lokasi Penelitian**

Bag. Organisasi Setda Sidoarjo, dengan pertimbangan sebagai leading sector tata Kelola TND sekaligus admin dan helpdesk Kabupaten

- **Fokus Penelitian**

Strategi pengembangan **e-Government** (e-Buddy) pada tata Kelola pengembangan dan keberlanjutan e-buddy ke depan

- **Tujuan Penelitian**

**Menganalisis efektivitas implementasi e-Buddy** dalam mendukung administrasi pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo, termasuk dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik.

**Mengidentifikasi tantangan dan hambatan** yang dihadapi dalam pengembangan dan penggunaan e-Buddy, seperti keterbatasan infrastruktur, kompetensi SDM, atau integrasi sistem.

- **Teknik Penentuan Informan**

Purposive Sampling

- **Informan Penelitian**

Admin Kabupaten / Utama (tata laksana)  
e-Buddy Bag. Organisasi SETDA  
Sidoarjo

- **Teknik Pengumpulan Data**

Penarikan rekapitulasi data dari akun e-Buddy Kabupaten, Analisis Data, Wawancara, Dokumentasi

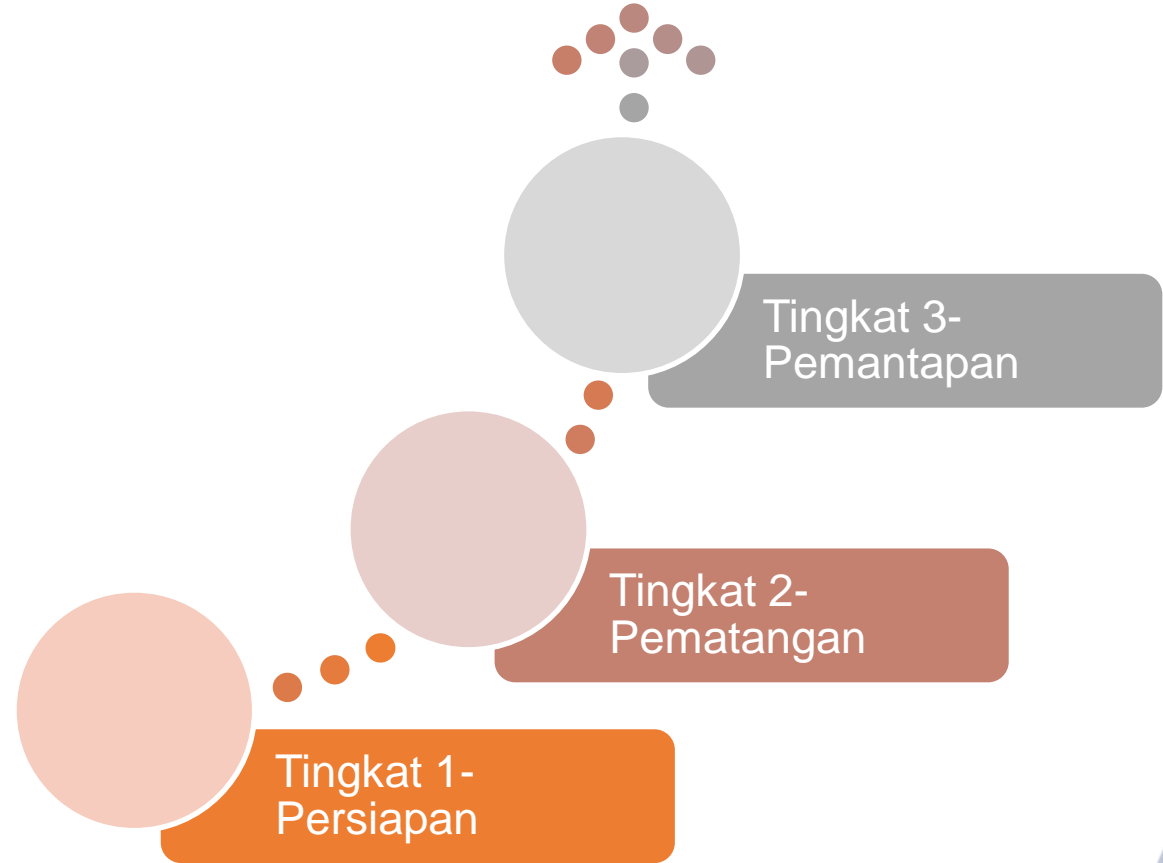
- **Key Informan**

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

# Hasil dan Pembahasan

Dalam menganalisis peneliti mengacu pada **Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003** mengenai strategi Pengembangan e-Government. Pengembangan e-Government dapat dilaksanakan melalui **4 (empat) tingkatan. Persiapan, Pematangan, Pemantapan dan Pemanfaatan**

Namun, dalam konteks Pengembangan e-Buddy di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo baru **melewati 3 tingkat** dan sedang menuju tahapan yang terakhir. Yaitu seperti gambar berikut:

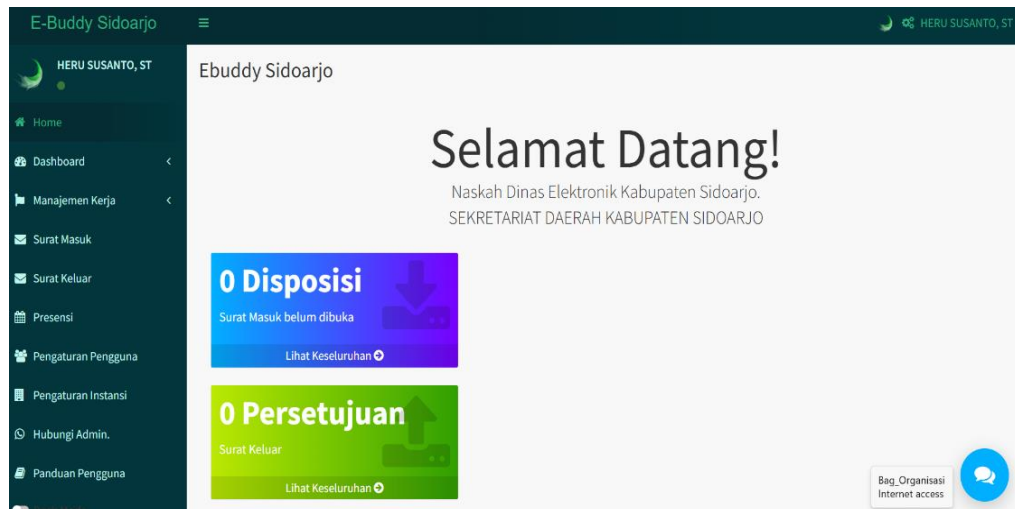




# Tingkat 1- Persiapan

## ■ FOKUS UTAMA DALAM TAHAP INI ADALAH:

### 1. Membangun infrastruktur dasar e-Government



Sumber: Website Ebuddy <https://e-buddy.sidoarjokab.go.id/site/chat>

### 2. Menyiapkan Sumber Daya Manusia, Sarana, dan akses Informasi.

*Dalam pelaksanaan operasional aplikasi e-Buddy dilakukan oleh admin unit kerja masing- masing instansi. Sampai saat ini terdapat sembilan ratus enam puluh dua (962) instansi , 29 PD, 2 RSUD, 18 Kecamatan, 31 Puskesmas, 28 Kelurahan, 21 UPTD, 318 Desa , 48 SMPN dan 467 SDN yang terintegrasi dan menggunakan e-Buddy. Masing-masing instansi memiliki satu (1) admin unit kerja. Selain admin unit kerja, juga terdapat admin pusat (admin kabupaten). (Wawancara dengan admin Kabupaten, yaitu Heru Susanto, ST).*

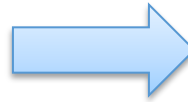
**3. Sosialisasi awal sistem** ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah , **Kecamatan , Puskemas, serta tahun 2022 Kelurahan/Desa** dan , SDN dan SMPN. Sosialisasi harus dilakukan serta pelatihan bagi pegawai agar mampu mengoperasikan sistem dengan baik. Pemerintah Sidoarjo juga melakukan sosialisasi penggunaan e-Buddy tidak hanya ditingkat pemerintah pusat kota atau kabupaten, tetapi juga ditingkat

# Tingkat 1- Persiapan

## ■ SUMBER DAYA YANG DISIAPKAN

Pada tahap ini setidaknya ada 3 sumber daya yang perlu disiapkan:

1. Sumber daya manusia: Terdapat **962 Unit Kerja yang terintegrasi e-Buddy**. Masing-masing mempunyai admin
2. Sumber daya finansial : CSR Indosat 2019, E-Buddy Tahun 2023 anggaran Rp 89 Juta. Adanya e-Buddy mampu membuat efisiensi anggaran hingga 5 milyar. Sumber dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA- SKPD) Tahun Anggaran 2023 Nomor 910/24/438.6.2/2023
3. Sumber daya fisik: **Komputer/laptop, internet, printer, server, ruang kerja.**



Sumber: Youtube Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

*“Pada tahap awal telah diselenggarakan program pelatihan bagi ASN bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah, Selan itu, pendampingan juga diberikan kepada perangkat daerah yang membutuhkan pendampingan (Wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi, yaitu Arif Mulyono, S.STP., M.HP.)*

# Tingkat 1- Persiapan

## TANTANGAN DALAM TAHAP INI

Dalam tahap awal persiapan ini masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi evaluasi.

### Perangkat Daerah Teknis

sebelum adanya sistem e-Buddy, seluruh pelayanan tersebut dilaksanakan secara **konvensional dan membutuhkan waktu lama.**

*Kalau dulu disposisi harus datang langsung ke kantor dan butuh waktu lama, apalagi saat membutuhkan persetujuan dan disposisi pimpinan atas, menjadi hambatan apabila pimpinan sedang tidak ada di kantor. Adanya e-Buddy ini bisa meminta disposisi atau persetujuan dimanapun dan kapanpun. (Wawancara dengan Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, yaitu Anita Inggit Zaenuris Shofa, S,STP., M.AP)*

### Kecamatan (Wilayah)

Perubahan sistem konvensional menjadi berbasis teknologi memerlukan adanya adaptasi bagi pegawai. Salah satu tantangan nya adalah adanya **staf yang masih belum maksimal dalam operasional, website yang belum sempurna, dan juga fitur- fitur belum lengkap**

*Satu-satunya tantangan atau hambatan adalah masih ada staf Kecamatan dan Desa yang gaptek (gagap teknologi), sehingga agak lambat dalam memahami dan mengimplementasikan aplikasi e-buddy. (Wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Krembung, yaitu Kusmanto, S.Sos. MA)*

# Tingkat 2- Pematangan

Pada tahap ini, fokusnya bukan sekedar membangun infrastruktur dasar, tapi mulai **meningkatkan kualitas sistem** agar makin fungsional, interaktif, dan siap berintegrasi dengan sistem lain. Berikut elemen-elemen utamanya yang berlaku di e-Buddy Sidoarjo:

Pengembangan situs informasi publik interaktif

Pembuatan antarmuka keterhubungan antar lembaga

Peningkatan SDM dan SOP

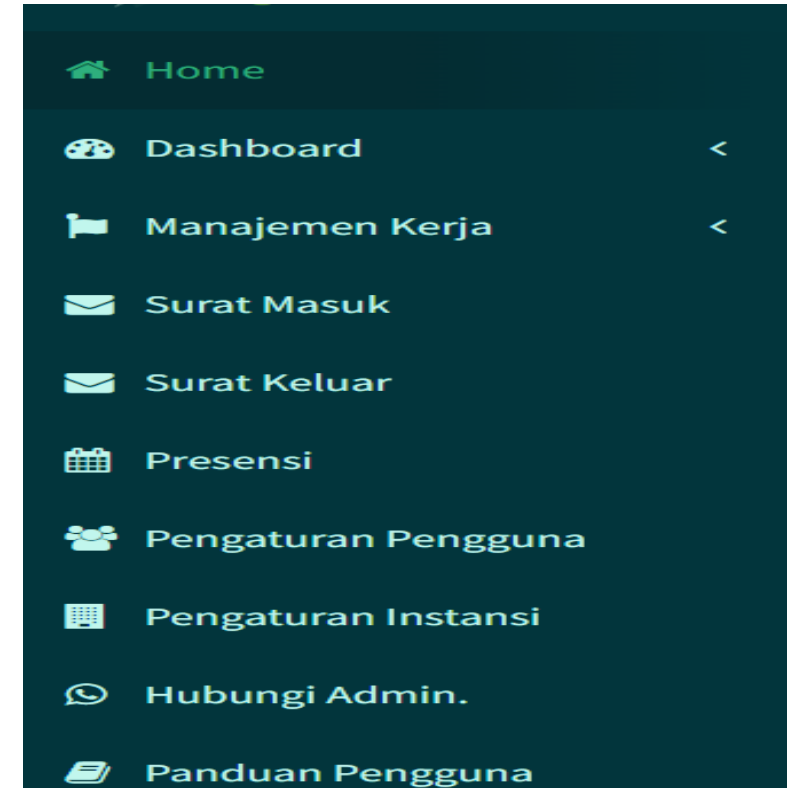
Peningkatan infrastruktur dan keamanan

# Tingkat 2- Pematangan

## 1. Pengembangan Fitur Interaktif e-Buddy

- **Dashboard pengguna:** pegawai atau admin bisa memantau status surat, notifikasi disposisi, atau progres permohonan layanan.
- **Layanan komunikasi dua arah :** ada fitur untuk mengajukan pertanyaan, klarifikasi, atau menyampaikan pengaduan
- **Jejak audit:** setiap perubahan atau tindak lanjut tercatat dalam sistem, sehingga bisa dilacak secara transparan.
- **Notifikasi otomatis :** misalnya, jika surat sudah didisposisikan atau layanan sudah selesai diproses, sistem akan mengirim pemberitahuan otomatis ke pengguna.

Gambar Fitur e-Buddy



Sumber: Website Ebuddy <https://e-buddy.sidoarjokab.go.id/site/chat>



# Tingkat 2- Pematangan














## 2. Pembuatan antarmuka keterhubungan antar Lembaga

e-Buddy juga sudah menggunakan mekanisme Single Sign-On (SSO), sehingga pegawai tidak perlu login ke banyak sistem berbeda.

## 3. Peningkatan SDM dan SOP

Peningkatan tidak hanya dari sisi teknologi, tapi juga SDM dan SOP. SOP digunakan sebagai panduan kerja serta alat evaluasi implementasi. Pelatihan/pendampingan bagi ASN meliputi teknis penggunaan aplikasi, etika digital, dan keamanan data. SOP mencakup alur pelaporan, validasi, dan eskalasi ke helpdesk jika diperlukan.

## SOP Penggunaan E-Buddy

No.	Kegiatan	Pelaksana			
		Pengguna	Admin Unit Kerja	Admin Pusat	Tim HelpDesk Pusat
1.	Menginput dan mengakses data surat masuk dan surat keluar, presensi, dan kinerja sesuai peran				
2.	Melaporkan kendala ke admin unit kerja atau melalui fitur pengaduan (chat atau pesan singkat e-buddy)				
3.	Melakukan validasi data surat dan kinerja unit				
4.	Menanggapi pengaduan pengguna pada tingkat unit kerja				
5.	Meneruskan pengaduan yang tidak dapat ditangani ke admin pusat/helpdesk				
6.	Mengelola pengaturan sistem, pengguna, dan akses				
7.	Monitoring data lintas unit				
8.	Menindaklanjuti eskalasi, pengaduan dan konsultasi dari admin unit kerja				
9.	Menerima dan merespons pengaduan tingkat kabupaten				
10.	Memberikan solusi teknis, dokumentasi dan kebijakan lebih lanjut				



# Tingkat 2- Pematangan

## 4. Penguatan infrastruktur dan keamanan

Server e-Buddy diperkuat agar lebih stabil, terutama di jam sibuk (misalnya jam absensi). Keamanan dijaga melalui enkripsi, autentikasi, dan sertifikat digital. Namun, masih ada kendala teknis dan kurangnya respons cepat atas surat yang masuk. Beberapa admin terpaksa menginformasikan keberadaan surat melalui WhatsApp.

# Tingkat 3- Pemantapan

Tahap ini menandai penerapan sistem transaksi nyata dalam e-Government. Menurut Vera (2024), **sistem yang telah mencakup efisiensi, transparansi, partisipasi publik, dan pemantauan masuk** tahap pemantapan. E-Buddy telah memenuhi aspek ini. Pengguna seluruh ASN, Non ASN, Perangkat Desa di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dari 22.913 (2022) menjadi 29.611 (2025).

Beberapa aspek penting dari tingkat pemantapan e-Buddy adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya transaksi pelayanan publik digital

2. Interoperabilitas data antar lembaga

3. Keamanan digital dan sertifikasi elektronik

# Tingkat 3- Pemantapan

## 1. Transaksi pelayanan publik digital

- *e-Buddy memungkinkan transaksi administratif digital seperti pengajuan surat keluar antar instansi dan tanda tangan elektronik. Wawancara: 'Kalau dulu disposisi harus datang ke kantor, sekarang bisa dari mana saja.'* – Anita Inggit Z. Shofa, DPMPTSP.
- Persetujuan surat kini fleksibel dan efisien dengan alur digital yang langsung ke pimpinan untuk koreksi atau persetujuan.

## 2. Interoperabilitas data antar Intern Pemkab

- e-Buddy telah dirancang untuk terintegrasi dengan sistem lain seperti Smart ASN (BKD), SIKSDA Single Salary (BPKAD), dan SIKD (Dinas Kearsipan Dinamis). Langkah strategis yang terus dilaksanakan integrasi dan kolaborasi dengan sistem lintas sektor nasional seperti **SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)**, sebuah aplikasi digital yang dikembangkan oleh **Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)** bekerja sama dengan **KemenPANRB, Kemenkominfo, dan BSSN** dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

# Tingkat 3- Pemantapan

## 3. Keamanan digital dan sertifikasi elektronik

- Dengan adanya transaksi nyata antar instansi , maka keamanan data perlu menjadi prioritas. Keamanan data dapat dilihat dari: Semua dokumen penting ditandatangani menggunakan **sertifikat elektronik (BSrE dan BSSN)**
- Proses persetujuan atau penolakan dilakukan hanya oleh akun yang terautentikasi
- Sistem diuji keamanannya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk **memastikan tidak rentan diretas atau disalahgunakan**
- Pengguna mempunyai hak akses sesuai peran mereka (*role- based access*).

**contoh tanda tangan elektronik yang digunakan dalam sistem e-Buddy.**

**a.n. Pj. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. ACHMAD ZAINI, M.M.

NIP. 196401311991031002

**Drs. ACHMAD ZAINI, M.M.**

**Pembina Utama Madya**

**NIP 19640131 199103 1 002**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

# Tingkat 3- Pemantapan

***“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk terus menggunakan dan mengembangkan e-Buddy sebagai sistem utama dalam pengelolaan tata naskah dinas elektronik.”*** . (Wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi, yaitu Arif Mulyono, S.STP., M.HP.).

Bagian Organisasi Setda sebagai **leading sector penyelenggaraan e-Buddy berkomitmen kuat untuk terus berkelanjutan** karena penggunaan e-Buddy juga didasarkan pada kesesuaian sistem dengan prinsip etika dan estetika birokrasi. Selain itu sistem ini telah mampu memfasilitasi **pelacakan kinerja individu berdasarkan tugas dan fungsinya**. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri bagi e-Buddy dalam konteks adaptasi teknologi.

# KESIMPULAN

Implementasi e-Buddy di Kabupaten Sidoarjo merupakan strategi digitalisasi administrasi yang efektif dalam menjawab tantangan **pandemi dan reformasi birokrasi**. Melalui tahapan persiapan hingga pemantapan, e-Buddy menghadirkan layanan tata kelola naskah dinas yang efisien, transparan, dan terintegrasi. Keberhasilan sistem ini ditunjang oleh peran aktif **SDM serta koordinasi lintas sektor**. Meskipun masih terdapat kendala literasi digital dan integrasi dengan sistem nasional seperti SRIKANDI, upaya peningkatan **kapasitas dan interoperabilitas** terus dilakukan secara **berkelanjutan**.



# SARAN

Adapun saran untuk pengembangan e-Buddy kedepan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan literasi digital ASN, terutama bagi pegawai di tingkat desa dan kecamatan yang masih menghadapi kendala teknis. Pelatihan dan pendampingan bersifat tematik dan berbasis kebutuhan masing- masing perangkat daerah perlu diperluas.
2. Integrasi penuh dengan sistem nasional (seperti SRIKANDI dan SMART ASN) harus segera diwujudkan agar e-Buddy dapat menjadi bagian dari ekosistem digital pemerintahan nasional.
3. Perlu dilakukan MONEV berkala secara komprehensif terhadap penggunaan e-Buddy perlu dilakukan untuk menilai tingkat adopsi, kendala teknis, serta efektivitas fitur yang ada.

# Referensi

- Republik Indonesia. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan & Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Jakarta
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Lingkungan Instansi Pemerintah
- **Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020** tentang **Tata Naskah Dinas Elektronik** dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Arief, A., & Yunus Abbas, M. (2021). *Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. PROtek : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, 8(1), 1–6. <https://doi.org/10.33387/protk.v8i1.1978>
- Sitanggang, N. P. (2022). *Hegemoni Kekuasaan Dalam Wacana Konseptualisasi Objek Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah*. 244–252.
- Aneta, A. (2012). *Perkembangan Teori Administrasi Negara*. *Jurnal Inovasi*, 9(1), 1–24. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jin/article/view/703%0Ahttps://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jin/article/download/703/647>
- Zaliluddin, D., Budiman, B., & Rully, A. (2020). *Implementasi E-Government Berbasis Android*. *JSil (Jurnal Sistem Informasi)*, 7(2), 83–88. <https://doi.org/10.30656/jsii.v7i2.2052>

# Referensi

- Rani, N. A., & Samin, R. (2023). *Strategi Pengembangan e-Government di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara), 11(2), 1-14.
- Widiyaningrum, W. Y. (2020). *Kajian Teoritis: Strategi Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Administrasi Secara Daring*. Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL), 1(2), 18-33.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeda.
- Mohamad Bintang, M. F. (2022). Analisis Pengembangan E-Office dalam Pelaksanaan E-Government Pada Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Kota Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 35-45.
- Maisaroh, N. S., & Rodiyah, I. (2024). Implementasi Program Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (E-Buddy) Di Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *Scholar.Arcvhive.Org*.
- Maulidiyah, A. N. (2023). Implementasi Transformasi Digital Pelayanan Nikah Pada Kua Kecamatan Blimbing Tinjauan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward Iii . *Etheses.Uin-Malang*.

# . Terima kasih



Sidoarjo , 16 Agustus 1976

Pengolah Data dan Informasi Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setda

- **Mohon bimbingan dan arahan**
  - **Semoga hasilnya bisa bermanfaat secara optimal**